



BUPATI MANDAILING NATAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2025 Bupati Mandailing Natal menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2025

- Mengingat
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Mandailing Natal.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.928.374.076.483
2. Belanja Daerah	Rp. 2.065.995.752.949,15
Surplus/ (Defisit)	(Rp.137.621.676.466,15)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp.137.621.676.466,15
b. Pengeluaran	Rp. 0
Pembiayaan Netto	Rp.137.621.676.466,15
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0	

#### Pasal 3

Pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.928.374.076.483 (Satu trilyun sembilan ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) huruf a sebesar Rp192.066.728.685 (Seratus sembilan puluh dua milyar enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp70.361.795.000 (Tujuh puluh milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp15.343.207.000 (Lima belas milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp15.000.000.000 (Lima belas milyar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp91.361.726.685 (Sembilan puluh satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

#### Pasal 5

- (6) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) sebesar Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp70.361.795.000 (Tujuh puluh milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), terdiri dari:
  - a. Pajak hotel sebesar Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah);

- c. Pajak pertandingan olahraga sebesar Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah);
  - d. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron Rp. 647.795.000 (Enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - e. Pajak penerangan jalan sumber lain sebesar Rp. 13.980.000.000 (Tiga belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
  - f. Pajak air tanah sebesar Rp. 724.000.000 (Tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah);
  - g. Pajak sarang burung walet sebesar Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah);
  - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp. 2.200.000.000 (Dua milyar dua ratus juta rupiah);
  - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp.6.600.000.000 (Enam milyar enam ratus juta rupiah);
  - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 20.000.000.000 (Dua puluh milyar rupiah).
  - k. Opsen Pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp. 11.000.000.000 (Sebeles milyar rupiah).
  - l. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp. 11.500.000.000 (Sebeleas milyar lima ratus juta rupiah).
- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) sebesar Rp15.343.207.000 (Lima belas milyar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu rupiah), terdiri dari:
- a. Retribusi jasa umum sebesar Rp. 4.150.000.000 (Empat milyar seratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Retribusi jasa usaha sebesar Rp. 8.593.207.000 (Delapan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu rupiah);
  - c. Retribusi perizinan tertentu sebesar Rp. 2.600.000.000 (Dua milyar enam ratus juta rupiah).
- (2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) sebesar Rp15.000.000.000 (Lima belas milyar rupiah), yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

- (3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) sebesar Rp91.361.726.685 (Sembilan puluh satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), terdiri dari :
- a. Hasil penjualan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebesar Rp. 2.424.200.000 (Dua milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
  - b. Jasa giro pada kas daerah sebesar Rp. 3.307.837.718 (Tiga milyar tiga ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
  - c. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara-Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 9.500.000.000 (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah);
  - d. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dari jasa layanan sebesar Rp. 76.129. 688.967 (Tujuh puluh enam milyar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.729.807.347.798 (Satu trilyun tujuh ratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.652.961.904.950 (Satu triliyun enam ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp76.845.442.848 (Tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

## Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) sebesar Rp1.652.961.904.950 (Satu triliyun enam ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), terdiri dari:
  - a. Dana desa sebesar Rp. 298.316.313.000 (Dua ratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus enam juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
  - b. Insentif Fiskal sebesar Rp. 7.118.778.000 (Tujuh milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
  - c. Dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp. 81.115.254.000 (Delapan puluh satu milyar seratus lima belas juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
  - d. Dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp. 899.587.754.000 (Delapan ratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan
  - e. Dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp. 366.823.805.950 (Tiga ratus enam puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (2) Pendapatan antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) sebesar Rp76.845.442.848 (Tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak.

## Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf c sebesar 6.500.000.000 (Enam milyar lima ratus juta rupiah), yang bersumber dari Pendapatan Hibah, yang bersumber dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang-undangan
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) 6.500.000.000 (Enam milyar lima ratus juta rupiah).

## Pasal 9

Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.065.995.752.949,15 (Dua trilyun enam puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah lima belas sen), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

## Pasal 10

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a sebesar Rp1.458.537.862.640 (Satu trilyun empat ratus lima puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp975.652.821.714 (sembilan ratus tujuh puluh lima milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.472.199.780.426 (Empat ratus tujuh puluh dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.0. (Nihil).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.0. (Nihil).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp5.725.260.500 (Lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp4.960.000.000 (Empat milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai dimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp975.652.821.714 (sembilan ratus tujuh puluh lima milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan KDH dan WKDH;
  - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH dan WKDH; dan
  - f. Belanja pegawai BOS.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 667.290.296.138 (Enam ratus enam puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 274.098.301.228 (Dua ratus tujuh puluh empat milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 23.868.581.648 (Dua puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 1.755.344.700 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.151.600.000 (Satu milyar seratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

- (7) Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 7.488.698.000 (Tujuh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) sebesar Rp.472.199.780.426 (Empat ratus tujuh puluh dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), terdiri dari:
- a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. Belanja barang dan jasa BOSP;
  - g. Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 107.806.398.936 (Seratus tujuh milyar delapan ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 151.683.708.223 (Seratus lima puluh satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 12.134.582.738 (Dua belas milyar seratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 58.878.784.460 (Lima puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.865.011.000 (Satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta sebelas ribu rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 50.615.760.584 (Lima puluh milyar enam ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 14.294.923.400 (Empat belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar 74.920.611.085 (Tujuh puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus sebelas ribu delapan puluh lima rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6) sebesar Rp5.725.260.500 (Lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah), terdiri dari :
  - a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 4.480.790.500 (Empat milyar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.244.470.000 (Satu milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

### Pasal 14

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 ayat (7) sebesar Rp. 4.960.000.000 (Empat milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

## Pasal 15

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b sebesar Rp189.023.197.009,15 (Seratus delapan puluh sembilan milyar dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan rupiah lima belas sen), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.8.187.500.000 (Delapan milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp59.312.374.097 (Lima puluh sembilan milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp48.423.416.033 (Empat puluh delapan milyar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp61.114.792.271,15 (Enam puluh satu milyar seratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah lima belas sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp11.985.114.608 (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus empat belas ribu enam ratus delapan rupiah).

## Pasal 16

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c sebesar Rp10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah).

## Pasal 17

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d sebesar Rp408.434.693.300 (Empat ratus delapan milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp8.510.500.200 (Delapan milyar lima ratus sepuluh juta lima ratus ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp399.924.193.100 (Tiga ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah).

## Pasal 18

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp137.621.676.466,15 (Seratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam rupiah lima belas sen).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 0 (nihil).

## Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) direncanakan sebesar Rp137.621.676.466,15 (Seratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam rupiah lima belas sen).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp137.621.676.466,15 (Seratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam rupiah lima belas sen).

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Mandailing Natal ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
11. Lampiran XI Daftar Alokasi Dana Kapitasi per FKTP;
12. Lampiran XII Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per Sekolah; dan
13. Lampiran XIII Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dana Negeri (TKDN).

#### Pasal 21

Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal ini.

#### Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan  
Pada tanggal 8 Januari 2025



BUPATI MANDAILING NATAL

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan  
pada tanggal 8 Januari 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,

DAULAY

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2025 NOMOR 1



**KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>192.066.728.685,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	70.361.795.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	250.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	250.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	250.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.000.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.000.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.000.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	60.000.000,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	60.000.000,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	60.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	647.795.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	647.795.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	647.795.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	13.980.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	13.980.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	13.980.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	724.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	724.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	724.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	400.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	400.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	400.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.200.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.200.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.200.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.600.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	6.600.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	6.600.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	20.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	20.000.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	11.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.20.01	Opsen PKB	11.000.000.000,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	11.000.000.000,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	11.500.000.000,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	11.500.000.000,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	11.500.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	15.343.207.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.150.000.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.500.000.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1.500.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.000.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.000.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	650.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	650.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.000.000.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.000.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	8.593.207.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.460.000.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	250.000.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	1.210.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	6.000.000.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	6.000.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	200.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	200.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	100.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	100.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	333.207.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	333.207.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	500.000.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	500.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.600.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.300.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.300.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	300.000.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	300.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.000.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	15.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	15.000.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	15.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	91.361.726.685,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.424.200.000,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	2.424.200.000,00
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.424.200.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	3.307.837.718,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.307.837.718,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.307.837.718,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	9.500.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.500.000.000,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	9.500.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	76.129.688.967,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	76.129.688.967,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	76.129.688.967,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.729.807.347.798,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.652.961.904.950,00
4.2.01.05	Dana Desa	298.316.313.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	298.316.313.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	298.316.313.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.118.778.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.118.778.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.118.778.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	81.115.254.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	47.952.524.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	38.058.390.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	9.894.134.000,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	29.538.523.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	12.330.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	12.742.707.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	14.782.180.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	462.123.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.539.183.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	3.624.207.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	3.624.207.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	899.587.754.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	632.417.527.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	632.417.527.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	267.170.227.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.400.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	44.139.614.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	87.987.353.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	61.717.775.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	67.925.485.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	366.823.805.950,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	26.117.018.950,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	678.193.000,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	262.831.000,00
4.2.01.09.01.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	500.000.000,00
4.2.01.09.01.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.192.000.000,00
4.2.01.09.01.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	621.678.950,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.536.800.000,00
4.2.01.09.01.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.197.781.000,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	14.827.106.000,00
4.2.01.09.01.0086	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	3.300.629.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	340.706.787.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	72.734.250.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	179.798.272.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.349.500.000,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	27.306.233.000,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.884.078.000,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.604.620.000,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	13.058.100.000,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	13.118.559.000,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	352.518.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	24.500.657.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	76.845.442.848,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	76.845.442.848,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	76.845.442.848,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.000.000.000,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	27.845.442.848,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.000.000.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	27.000.000.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>6.500.000.000,00</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.500.000.000,00
4.3.03.06	Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi	6.500.000.000,00
4.3.03.06.01	Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi	6.500.000.000,00
4.3.03.06.01.0001	Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi	6.500.000.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.928.374.076.483,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.458.537.862.640,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	975.652.821.714,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	667.290.296.138,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	496.689.958.269,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	317.780.824.624,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	178.909.133.645,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	54.664.805.892,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	29.628.925.612,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	25.035.880.280,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.231.316.635,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.193.516.635,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	37.800.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.918.995.062,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.918.995.062,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	16.079.310.452,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.887.435.702,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	10.191.874.750,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	35.164.869.081,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	18.782.342.361,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	16.382.526.720,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	844.287.442,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	840.773.782,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	3.513.660,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.911.234,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.570.952,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.340.282,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	30.572.842.071,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	20.824.231.036,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	9.748.611.035,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.000.000.000,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.000.000.000,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.000.000.000,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	4.100.000.000,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	2.600.000.000,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	1.500.000.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	274.098.301.228,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	53.826.172.197,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	52.787.422.197,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.038.750.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	4.880.540.731,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	4.292.040.731,00
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	588.500.000,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	215.391.588.300,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	6.875.000,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	72.875.000,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	484.000,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	13.750.000,00
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	376.200.000,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	19.910.000,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	11.000.000,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	63.250.000,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	270.000.000,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	636.950.875,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	176.880.000,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	16.637.500,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.427.500,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	26.045.250,00
5.1.01.02.06.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	3.850.000,00
5.1.01.02.06.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	1.512.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0034	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	13.750.000,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	38.589.925,00
5.1.01.02.06.0036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	165.000.000,00
5.1.01.02.06.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	3.025.000,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.512.500,00
5.1.01.02.06.0047	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.196.250,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	60.500.000,00
5.1.01.02.06.0051	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	8.250.000,00
5.1.01.02.06.0060	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	5.500.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	179.798.272.000,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	27.306.233.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.349.500.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.928.612.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.868.581.648,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	124.332.600,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	124.332.600,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	162.220.800,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	162.220.800,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	89.230.400,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	89.230.400,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.693.820.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.693.820.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	131.513.550,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	131.513.550,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.559.950,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.559.950,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.040.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.040.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.260.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.260.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	420.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	420.000.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.527.878.848,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	92.878.848,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	10.000.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.000.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.418.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.448.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.448.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	63.735.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	63.735.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.755.344.700,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	181.285.597,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	181.285.597,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	24.620.480,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	24.620.480,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	178.058.800,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	178.058.800,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	23.662.600,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	23.662.600,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.182.182,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.182.182,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.413,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.413,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.864.240,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.864.240,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.040.600,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.040.600,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.275.088,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.275.088,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.012.877.625,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	5.625.000,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	59.625.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	396.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	11.250.000,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	307.800.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	16.290.000,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	9.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	51.750.000,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	30.000.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	521.141.625,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	322.467.075,00
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	27.270.000,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	13.612.500,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12.622.500,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	21.309.750,00
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	3.150.000,00
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.237.500,00
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	11.250.000,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	31.573.575,00
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	135.000.000,00
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	2.475.000,00
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.237.500,00
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	978.750,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	49.500.000,00
5.1.01.05.11.0032	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	6.750.000,00
5.1.01.05.11.0041	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	4.500.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.151.600.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	751.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	751.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	7.488.698.000,00
5.1.01.89.02	Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD	5.884.078.000,00
5.1.01.89.02.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD Reguler	5.884.078.000,00
5.1.01.89.03	Belanja Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan	1.604.620.000,00
5.1.01.89.03.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.604.620.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.199.780.426,00
5.1.02.01	Belanja Barang	107.806.398.936,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	101.196.050.818,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.324.054.655,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	84.545.200,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.156.326.725,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	8.490.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	732.920.300,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.348.250,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	28.804.050,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	24.150.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	105.796.450,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	608.053.600,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	7.297.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.397.959.829,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.670.128.078,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	338.749.266,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	758.781.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.513.679.059,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.042.472.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.900.364.350,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.616.204.900,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	58.015.550,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	604.421.600,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	413.577.400,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.159.611.437,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	7.717.810.500,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.561.882.400,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	12.346.261.500,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.416.178.619,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	153.735.200,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	271.162.400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.261.431.500,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	58.320.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	4.484.690.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	75.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	49.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	139.872.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	378.093.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	74.973.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	90.500.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	348.687.500,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	140.502.500,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	61.200.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	6.610.348.118,00
5.1.02.01.04.0024	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor	1.108.000,00
5.1.02.01.04.0038	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	48.127.500,00
5.1.02.01.04.0103	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.335.500,00
5.1.02.01.04.0104	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	5.390.500,00
5.1.02.01.04.0110	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	120.598.900,00
5.1.02.01.04.0112	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	0,00
5.1.02.01.04.0114	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	9.279.800,00
5.1.02.01.04.0116	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	30.744.850,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	184.959.650,00
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	331.617.750,00
5.1.02.01.04.0119	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	2.438.100,00
5.1.02.01.04.0121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	48.793.050,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	22.133.900,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	549.815.346,00
5.1.02.01.04.0124	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	89.600.950,00
5.1.02.01.04.0125	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	13.390.450,00
5.1.02.01.04.0126	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	12.861.404,00
5.1.02.01.04.0127	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	31.876.775,00
5.1.02.01.04.0128	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	4.820.550,00
5.1.02.01.04.0131	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	223.612.400,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.04.0138	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	41.036.200,00
5.1.02.01.04.0204	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	3.810.600,00
5.1.02.01.04.0232	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	827.100,00
5.1.02.01.04.0312	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	171.000.000,00
5.1.02.01.04.0405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.079.080.600,00
5.1.02.01.04.0406	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	110.657.543,00
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	377.840.950,00
5.1.02.01.04.0410	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	57.154.850,00
5.1.02.01.04.0451	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	31.050.000,00
5.1.02.01.04.0494	Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	3.813.200,00
5.1.02.01.04.0505	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	7.955.250,00
5.1.02.01.04.0509	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	8.359.200,00
5.1.02.01.04.0521	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	678.201.300,00
5.1.02.01.04.0576	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.000.000.000,00
5.1.02.01.04.0586	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.000.000.000,00
5.1.02.01.04.0647	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	86.400.000,00
5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	220.480.000,00
5.1.02.01.04.0743	Belanja Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan	175.950,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	151.683.708.223,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	99.763.009.833,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.029.636.050,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.492.115.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	3.600.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	35.880.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	336.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.158.100.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.780.318.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	216.000.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	106.800.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	16.800.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	48.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.788.000.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.444.200.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9.979.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.090.514.356,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.148.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.852.800.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	447.600.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	108.000.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	77.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	111.142.400,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	18.558.205.500,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	60.280.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	9.110.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	390.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	557.316.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	312.503.905,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.177.103.165,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.232.355.177,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.037.045.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.985.279.800,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	137.585.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.029.100.000,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	9.974.620.480,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	44.267.157.600,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	43.130.976.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	312.009.600,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	327.564.000,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	295.600.000,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	201.008.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	393.992.690,00
5.1.02.02.03.0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	393.992.690,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.666.222.100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	7.215.600,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	7.190.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	952.480.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	50.000.000,00
5.1.02.02.04.0041	Belanja Sewa Kendaraan Tempur	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	291.786.500,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.357.550.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.027.396.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	62.448.000,00
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	15.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.546.935.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	629.800.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.682.100.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	91.113.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	321.500.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	321.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	244.430.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	244.430.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.134.582.738,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.890.993.200,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	950.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.897.640.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.533.780.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	49.500.000,00
5.1.02.03.02.0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	382.350.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	958.490.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	114.547.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	4.686.200,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	634.648.530,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	199.993.180,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	343.097.514,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	91.557.836,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.608.941.008,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.04.0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	370.012.048,16
5.1.02.03.04.0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	438.928.959,84
5.1.02.03.04.0065	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	500.000.000,00
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	200.000.000,00
5.1.02.03.04.0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	58.878.784.460,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	58.878.784.460,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.978.274.460,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.900.510.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.865.011.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.497.200.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.497.200.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	367.811.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	367.811.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	50.615.760.584,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	50.615.760.584,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	49.484.760.584,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.131.000.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	14.294.923.400,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	14.294.923.400,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	14.294.923.400,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	74.920.611.085,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	74.920.611.085,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	74.920.611.085,00
5.1.05	Belanja Hibah	5.725.260.500,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.480.790.500,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.380.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.380.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	500.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	500.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.600.790.500,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.600.790.500,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.244.470.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.244.470.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.244.470.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.960.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.092.500.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.092.500.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.092.500.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.867.500.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.867.500.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.867.500.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>189.023.197.009,15</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.187.500.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	8.187.500.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	7.587.500.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	6.437.500.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.150.000.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	600.000.000,00
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	600.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.312.374.097,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.060.810.210,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	278.518.600,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	278.518.600,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.782.291.610,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	1.748.885.650,00
5.2.02.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	15.525.000,00
5.2.02.01.03.0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	17.880.960,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	10.932.925.800,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	10.916.365.800,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.500.000.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	351.945.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.998.247.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	186.113.800,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	4.880.060.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	16.560.000,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	16.560.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	200.736.096,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.552.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	1.552.500,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	199.183.596,00
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	115.000.000,00
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	59.372.346,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	24.811.250,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	104.815.350,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	104.815.350,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	41.005.700,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	4.199.600,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	32.650.000,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	26.960.050,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.070.934.621,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	918.199.650,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	560.550,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	174.895.450,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	742.743.650,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	11.484.918.842,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	9.468.931.325,00
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	0,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	25.913.850,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	591.621.519,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	20.721.750,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.257.968.766,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	119.761.632,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.667.816.129,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	297.690.450,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	182.486.250,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	487.192.400,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	36.911.697,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	27.860.832,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	635.674.500,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.531.137.900,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	48.735.150,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.256.300,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	31.235.850,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	4.065.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	11.178.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	1.482.402.750,00
5.2.02.06.03.0021	Belanja Modal Feeder	1.341.322.600,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	141.080.150,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.302.102.761,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.945.770.272,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.424.237.312,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	105.321.560,00
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	352.000.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	64.211.400,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	356.332.489,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	356.332.489,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00
5.2.02.08.01.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	9.081.943.896,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.798.531.446,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.584.286.446,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	214.245.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.283.412.450,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	31.050.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	918.899.750,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	119.951.250,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.213.511.450,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	606.430.400,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	606.430.400,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	606.430.400,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	96.636.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	96.636.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	96.636.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	10.428.626.608,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	10.428.626.608,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	10.428.626.608,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.895.274.455,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.895.274.455,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.895.274.455,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.423.416.033,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	47.663.416.033,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	47.273.896.033,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	12.947.017.790,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	11.044.606.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	22.644.300.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	52.290.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	585.682.243,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	389.520.000,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	389.520.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	760.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	760.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	760.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.114.792.271,15
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	49.201.773.827,85
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	42.401.773.827,85
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	33.279.643.150,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	9.122.130.677,85
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	6.800.000.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	6.800.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.816.979.947,30
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	8.158.550.867,30
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	8.158.550.867,30
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.400.000.000,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	1.400.000.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.258.429.080,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	51.170.000,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.207.259.080,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.096.038.496,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.096.038.496,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.096.038.496,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.985.114.608,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	144.222.750,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	144.222.750,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	25.586.000,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	11.924.000,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	18.322.500,00
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	15.032.000,00
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	23.340.500,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	3.369.000,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	24.430.000,00
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	13.740.000,00
5.2.05.01.01.0010	Belanja Modal Serial	8.478.750,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	120.016.100,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	82.823.500,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	82.823.500,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	18.570.850,00
5.2.05.02.02.0003	Belanja Modal Barang Kerajinan	18.570.850,00
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	18.621.750,00
5.2.05.02.03.0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	18.621.750,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	31.012.950,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	31.012.950,00
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	31.012.950,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	11.689.862.808,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	11.689.862.808,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	10.935.862.808,00
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	754.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>408.434.693.300,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.510.500.200,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.510.500.200,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.510.500.200,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.510.500.200,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	399.924.193.100,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	399.924.193.100,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	399.924.193.100,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	3.900.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	298.316.313.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	97.707.880.100,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.065.995.752.949,15</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-137.621.676.466,15</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>137.621.676.466,15</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	137.621.676.466,15
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	132.175.479.893,15
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	132.175.479.893,15
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	132.175.479.893,15
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	5.446.196.573,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	5.446.196.573,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	5.446.196.573,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>137.621.676.466,15</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00


  
 BUPATI MANDAILING NATAL,  
  
 MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION